

Pergeseran Orientasi Politik Mantan Aktivist Pro-demokrasi di Bali: Dari Idealis ke Pragmatis

Nicholas Edieth J. Enrico Sinaga^{*1}, Kadek Dwita Apriani², Anak Agung Sagung Mirah Mahaswari Jayanthi Mertha³

¹²³ Departemen Ilmu Politik, Universitas Udayana

Abstract. This article discusses the change in the political orientation of former pro-democracy activists in Bali after more than 20 years of the reformation. The change in their orientation from idealistic to pragmatic is allegedly one of the catalysts for the decline of democracy. This study aims to determine the causes of the change in the political orientation of former pro-democracy activists in Bali and to make a categorization from the political orientation of these former activists. The theory used as the analytical tool is the rational choice theory from Barbara Geddes. This research uses qualitative methods with a case studies approach. There are two important findings in this study: (1) The change in political orientation from idealistic to pragmatic is caused by the rational choices made by former pro-democracy activists by calculating their career and needs factors. (2) If career motives are more prominent than transactional and partisanship motives, then former pro-democracy activists tend to fill the positions in non-political party institutions. On the contrary, if the partisan motive is dominant in a former activist, then they tend to fill the position in a political party.

Keywords: Democracy; Former Activists; Idealism; Pragmatism; Bali.

Abstrak. Artikel ini membahas tentang perubahan orientasi politik para mantan aktivis pro-demokrasi di Bali setelah 20 tahun lebih reformasi bergulir. Pergeseran orientasi mereka dari idealis menuju pragmatis disinyalir sebagai salah satu katalis dari kemunduran demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pergeseran orientasi politik para mantan aktivis pro-demokrasi di Bali dan membuat kategorisasi dari pergeseran orientasi politik para mantan aktivis ini. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori pilihan rasional dari Barbara Geddes. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Terdapat dua temuan penting dalam penelitian ini: (1) Pergeseran orientasi politik dari idealis menuju pragmatis ini disebabkan oleh pilihan rasional yang diambil para mantan aktivis pro-demokrasi dengan mengkalkulasi faktor karier dan kebutuhan. (2) Bila motif karier lebih menonjol dibanding motif transaksional dan *partisanship*, maka mantan aktivis pro-demokrasi cenderung mengisi posisi di institusi non partai politik. Sebaliknya jika motif partisan yang dominan pada seorang mantan aktivis, maka mereka cenderung mengisi posisi di partai politik.

Kata Kunci: Demokrasi; Mantan Aktivist; Idealisme; Pragmatisme; Bali.

Received: 28 Januari 2022

Revised: 8 Maret 2022

Accepted: 22 Maret 2022

***Korespondensi:**

Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Udayana
Jl. PB Sudirman (Kampus Sudirman) Denpasar,
Bali 80361
Email: ediethenrico@gmail.com

PENDAHULUAN

Aktivistis pro-demokrasi memiliki peran besar dalam fase transisi menuju demokrasi di Indonesia, tak terkecuali di Bali. Setelah lebih dari 20 tahun proses transisi terjadi, kini muncul sebuah kecenderungan mundurnya demokrasi di Indonesia. Hal itu memunculkan pertanyaan tentang orientasi politik para mantan aktivis pro-demokrasi yang dulu merupakan aktor penting dari perubahan politik. Para mantan aktivis pro-demokrasi di Bali khususnya, tidak lagi bersuara lantang tentang perjuangan mereka dan cenderung pasif dalam menanggapi isu kemunduran demokrasi. Lalu muncul dugaan bahwa para mantan aktivis ini mengalami pergeseran orientasi dari idealis menuju pragmatis karena tidak sedikit dari mereka yang akhirnya mengisi posisi di partai politik dan komisi-komisi independen yang pembiayaannya bersumber pada negara.

Artikel ini berupaya mengkaji alasan di balik perubahan orientasi politik beberapa mantan aktivis pro-demokrasi dari idealis ke individu yang cenderung pragmatis. Lebih dari dua dekade semenjak Indonesia memasuki era reformasi, era baru yang dituntut oleh aktivis pro-demokrasi menuntut demokratisasi dan desentralisasi seluas-luasnya (Hadiz, 2005; Törnquist, 2006; Aspinall, 2012; Mietzner, 2013; Sastramidjaja, 2019). Aktivis pro-demokrasi memiliki peran signifikan (Giugni, 1999) yang dapat menggeser hubungan kekuasaan antara penantang dan otoritas, mengubah arah kebijakan, atau memprovokasi perubahan sistemik yang lebih luas. Pada tahapan tertentu mereka juga berpotensi memberikan perubahan dalam institusi politik atau dalam domain sosial atau budaya. Namun setelah itu, mereka biasanya terkooptasi ke dalam partai-partai klientelis atau melebur ke dalam lembaga pemerintah, dan bisnis.

Beberapa penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan peran aktivis yang tergabung dalam organisasi atau gerakan kolektif yang mendukung upaya reformasi (Hadiz & Robison, 2004; Aspinall, 2005; Bünthe & Ufen, 2009; Lee, 2016; Stokke & Hiariej, 2017), hingga posisi aktivis yang tidak lagi signifikan pasca Orde Baru karena tidak mampu bersaing dengan elit-elit lama yang telah mengumpulkan kapital (ekonomi dan jaringan sosial) mereka di rezim Orde Baru (Törnquist, 2006; Mietzner, 2013; Alamsyah, 2015). Artikel ini berusaha melihat kasus tersebut dari sudut pandang

yang berbeda, yakni berfokus pada mantan aktivis pro-demokrasi dengan menyoroti motif yang melatarbelakangi pergeseran peran oleh mantan aktivis.

Pasca gerakan reformasi 1998, para aktivis pro-demokrasi mulai mengubah arah mereka. Aktivis pro-demokrasi berupaya untuk mereformasi kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia dari dalam, mengubah strategi lama “perjuangan dari luar” (Dibley & Ford, 2019). Sekarang, aktivis pro-demokrasi nyaris tidak berbeda dengan politikus oportunistis lain. Mereka cenderung mewakili kepentingan partai politik atau patron politik mereka, bukannya mewakili kelompok masyarakat yang termarginal (Mudhoffir & Alamsyah, 2018). Label aktivis oportunistis ditolak oleh sebagian mantan aktivis yang menduduki jabatan penting pemerintahan. Meskipun sebagian yang lain mengakui klaim tersebut karena bagi mereka mantan aktivis memiliki kesempatan untuk memperbaiki di dalam dengan *benefit* ketokohan dan keilmuan sang aktor. Pengalaman aktivis pro-demokrasi terhadap politik nasional setelah runtuhnya rezim otoriter membuat mereka mencari bentuk kerja sama baru di tingkat lokal yang bermanfaat. Praktik tersebut berlangsung di antaranya di Bali.

Bali merupakan salah satu basis dukungan terbesar PNI di luar Jawa di era pemerintahan Soekarno. Namun, ketika Soeharto berkuasa partai Golkar berupaya untuk melakukan aksi penyeragaman untuk mengajak pendukung PNI masuk Golkar. Karena ada sebagian pendukung PNI yang menolak untuk bergabung maka pergesekan ideologi kerap terjadi dan sering kali menghasilkan kekerasan politik antara kedua partai politik tersebut (Suryawan, 2010). Tahun 1973, di bawah kepemimpinan Soeharto, pemerintah melakukan fusi partai-partai politik. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan payung dari gabungan PNI, Partai Katolik, IPKI, Parkindo, dan Partai Murba. Meski tergabung dari beberapa partai, PNI adalah komponen terbesar PDI dan tidak diragukan lagi PDI adalah penerus politik PNI (Mietzner, 2012). Dengan dilakukannya penyederhanaan, sebagian besar pendukung PNI spontan mendukung PDI termasuk diantaranya aktivis pro-demokrasi. Pada tahun 1998, kelompok pendukung reformasi di Bali bergerak di bawah koalisi GMNI dengan anggota PDI. Mereka mengorganisir beberapa protes besar salah satunya Gerakan Rakyat Bali (Aspinall, 2005). Pasca reformasi beberapa aktivis pro-demokrasi di Bali melakukan transisi penuh ke dunia kepartaian dan perjuangan birokrasi.

Mereka adalah anggota tim ahli pemerintah daerah, pejabat publik, atau elit partai politik.

Berangkat dari pergeseran orientasi politik oleh mantan aktivis pro-demokrasi, penulis berargumen bahwa kepentingan pribadi dan perkembangan karier memberikan kontribusi dalam perubahan tersebut. Analisis dalam artikel ini dimulai dari mencari akar idealisme dan awal mula keterlibatan mantan aktivis pro-demokrasi dalam masyarakat sipil dan gerakan sosial. Lebih lanjut, penulis juga melakukan kategorisasi mantan aktivis berdasarkan institusi partai dan non-partai serta bentuk pragmatisme yang diterapkan oleh mantan aktivis pro-demokrasi.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus dipilih untuk mengeksplorasi latar belakang dari setiap mantan aktivis untuk mendapatkan kerangka analisis yang komprehensif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, sumber data primer dan sekunder (Creswell & Creswell, 2018). Sumber data primer merupakan data utama yang penulis dapatkan melalui wawancara mendalam dengan informan. Wawancara dilakukan dengan lima mantan aktivis yang pernah atau sedang menduduki jabatan penting di lembaga pemerintahan atau yang terjun dalam politik praktis. Sumber data sekunder adalah data pendukung yang melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran artikel, data daring, dan studi pustaka yang berhubungan dengan variabel penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivis Pro-demokrasi: Dari Idealis menuju Pragmatis

Konsolidasi merupakan salah satu instrumen penting dalam negara demokrasi. Menurut Whitehead (1989) dalam Zuhro (2019), konsolidasi demokrasi adalah instrumen untuk meningkatkan komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Hal tersebut tidak hanya merupakan proses politik yang berlaku di level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat

sipil (*political society, economic society, the state, dan civil society*) mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan (Linz & Stepan, 1996). Di rezim Orde Baru, pandangan aktivis pro-demokrasi bertentangan dengan kenyataan sistem pemerintahan yang cenderung otoriter. Mereka semakin kritis dengan permasalahan sosio-politik dan ekonomi yang tidak mampu diselesaikan oleh negara saat itu. Praktik korupsi, stagnasi demokrasi, hingga pemilu yang manipulatif di rezim Orde Baru tidak mencerminkan negara yang mengusung konsep yang demokratis. Ketika kondisi negara yang tidak stabil, ide atau cita-cita aktivis pro-demokrasi kemudian dimanifestasikan ke dalam diskusi hingga gerakan.

Pasca 1998, sebagian besar aktivis pro-demokrasi menduduki jajaran elite pemerintah baik pada level pusat maupun daerah. Sebagian besar dari kelompok aktivis pro-demokrasi menggunakan jaringan aktivis untuk menduduki posisi-posisi tersebut. Sebagian besar aktivis reformis bersikap pragmatis dengan menentukan tujuan politiknya berdasarkan kepentingan semata. Kepentingan yang akan diraih adalah keuntungan dan kekuasaan (Ekowati, 2019). Marcus Mietzner (2013) membagi kelompok aktivis pro-demokrasi yang terjun dalam politik formal menjadi empat kriteria yakni; (a) Politisi yang sebelumnya berpartisipasi dalam aktivisme masyarakat sipil sebagai bagian dari persiapan mereka untuk terlibat dalam politik yang lebih matang. Dalam kelompok ini, aktivis seringkali sangat kritis dalam organisasi pemuda diikuti dengan karier yang lebih formal di bidang politik; (b) Mereka yang memilih masyarakat sipil sebagai pelarian dari regulasi ketat dunia politik Suharto. Namun, setelah kejatuhannya, mereka sepenuhnya memeluk sistem demokrasi baru dan peluang partisipasi politik yang ditawarkannya; (c) Aktivis reformis yang menyeberang ke politik formal karena kekurangan yang melekat pada demokrasi Indonesia pasca 1998. Kelompok inilah yang paling konsisten dalam menegakkan prinsip reformis dalam interaksi politik sehari-hari; (d) Tokoh masyarakat sipil reformis yang beroperasi di persimpangan urusan politik dan aktivisme pro-demokrasi. Enggan melakukan transisi penuh ke dunia intrik partai dan perjuangan birokrasi, para aktivis ini adalah anggota tim penasihat menteri, legislator, eksekutif pemerintah daerah, dan kandidat yang mencalonkan diri untuk jabatan publik.

Aktivis pro-demokrasi di Bali menunjukkan corak yang mirip dengan kelompok aktivis yang dituliskan Mietzner (2013). Sebagian aktivis pro-demokrasi Bali memanfaatkan jaringan aktivis untuk persiapan mereka berkarier baik di lembaga negara atau tim penasihat eksekutif di tingkat daerah. Aktivis lain memanfaatkan pengaruhnya untuk sekedar menjabat sebagai pejabat publik hanya untuk mendapat pendapatan tetap.

Perubahan Orientasi Politik: Antara Pilihan Rasional dan Keniscayaan

Pasca reformasi, perubahan muncul pada mantan aktivis Bali di banyak aspek kehidupan. Sebagian besar aktivis reformasi berstatus mahasiswa dan ketika lulus, peran mereka sepenuhnya berubah. Artikel ini menggunakan teori pilihan rasional yang ditulis oleh Barbara Geddes dalam karyanya yang berjudul *Politician's Dilemma* (1994).

Teori pilihan rasional yang diuraikan Geddes bermaksud menjelaskan fenomena aktor politik yang rasional berfokus pada aktor politik dan berbagai insentif yang mereka hadapi. Kunci dari argumen tersebut adalah model sederhana dari politisi dan birokrat sebagai individu rasional berusaha memaksimalkan kesuksesan karier mereka. Latar belakang argumen Geddes berangkat dari tulisan Crain dan Tollison (1990), bahwa perilaku manusia dalam pemerintahan dimotivasi oleh kekuatan kepentingan pribadi, yang memandu perilaku manusia dalam *setting* pribadi. Apabila keputusan negara dibuat oleh aktor, maka isi keputusan mereka - termasuk keputusan yang berkontribusi pada reformasi negara itu sendiri akan mencerminkan kepentingan mereka (Geddes, 1994).

Perubahan orientasi aktivis ditinjau dari bagaimana mantan aktivis melihat manfaat yang diharapkan sebagai hasil dari tindakan mereka. Individu di negara berkembang memiliki alasan yang sangat tidak pasti tentang kemungkinan menerima manfaat di masa depan. Berdasarkan pengalaman masa lalu, mereka mungkin memiliki alasan yang baik untuk mengharapkan distribusi manfaat (Geddes, 1994).

Negara demokrasi dengan basis patronase membuat agenda reformasi menjadi sulit untuk terwujud. Diperlukan tindakan kolektif untuk mencapai agenda reformasi, di mana sebagian besar masyarakat bekerja sama untuk mewujudkannya. Namun, kerja sama ini membutuhkan pengorbanan irasional bagi individu yang tergabung

dalam gerakan kolektif tersebut. Akibatnya, individu berusaha menjadi penumpang bebas, dengan berbagi keuntungan tanpa berkontribusi pada pencapaiannya, dan pada akhirnya organisasi yang menuntut reformasi cenderung tidak terbentuk. Pasca reformasi, ketidakhadiran partai hijau untuk mengakomodasi kepentingan kelompok anti *status-quo* membuat kelompok ini kehilangan arah. Beberapa dari mereka terkooptasi dengan partai politik besar sehingga agenda reformasi tidak dapat sepenuhnya terpenuhi.

Akar Idealisme dan Keterlibatan Aktivist Pro-demokrasi Bali dalam Masyarakat Sipil

1. I Gede John Darmawan (Anggota KPU Provinsi Bali)

I Gede John Darmawan merupakan aktivis reformasi yang sekarang menjabat sebagai anggota KPU Provinsi Bali. Setelah lulus dari SMUN Malang, Pada tahun 1997 John melanjutkan studi perguruan tinggi di Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya. Ada beberapa peristiwa penting di tahun 1997 yang disaksikan oleh John sebagai mahasiswa baru seperti, resesi ekonomi global khususnya di Asia yang berdampak kurs Rupiah yang terus melemah terhadap Dollar AS dan terpilihnya Soeharto pada pemilihan umum 1997.

Pada tahun pertamanya sebagai mahasiswa, John sudah terlibat aktif dalam gerakan mahasiswa. Awalnya John terlibat namun belum tergabung secara formal dengan organisasi mahasiswa ataupun LSM yang melatarbelakangi demo. John terlibat dalam beberapa gerakan yang dimobilisasi oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sejak Juli 1997. Meskipun dirinya bukan seorang Muslim, John mengaku bahwa selama periode reformasi, dirinya terlatih dan berkembang di HMI. John dan rekan-rekannya di HMI sempat ditahan oleh aparat keamanan di Kodim Malang-Batu karena menguasai Radio Republik Indonesia (RRI) untuk menyebarkan pernyataan sikap mahasiswa Malang.

“Saya tidak join ekstra. Saya dilatih oleh ekstra waktu itu. Dilatih oleh HMI. Saya bukan muslim, tetapi waktu itu teman-teman HMI sudah bergerak dan konsisten dari awal. Tahun 97 akhir teman-teman HMI sudah konsisten bergerak. Saya terlatih disitu, mengikuti proses. Kita kuasai RRI. Kita bikin pernyataan sikap mahasiswa. Kita kuasai kampus. Prosesnya diawali di ekstra

kampus dulu.” (Wawancara John Darmawan, tanggal 10 Maret 2021 di Kantor KPU Provinsi Bali).

Pasca 12 Mei 1998 (peristiwa tertembaknya empat mahasiswa Trisakti) John menjadi Asisten Teritorial Korlap yang bertugas memetakan keadaan jalur gerakan dan membantu mobilisasi mahasiswa untuk bergerak dari kampus menuju kantor DPRD Kota Malang. Asisten Teritorial Korlap bergerak atas kesepakatan dari para ketua senat se-Indonesia yang memutuskan untuk bergerak bersama merespon peristiwa 12 Mei. Beberapa hari sebelum perayaan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei, John masuk daftar orang yang akan ditangkap apabila memobilisasi mahasiswa Brawijaya lain untuk turun ke jalan untuk berdemonstrasi. Namun dirinya berhasil kabur dari pengawasan aparat penegak hukum.

Pada tahun 1999, John baru tergabung dalam Senat Fakultas Hukum sebagai anggota bidang minat dan bakat dan tetap aktif dalam gerakan. Keaktifannya dalam setiap gerakan mahasiswa baik dalam level kampus atau masyarakat membuatnya lebih dikenal di lingkungan Fakultas Hukum. Pada tahun 2000 dirinya berhasil menjadi ketua senat Fakultas Hukum. John berhasil menjabat posisi tersebut karena faktor ketokohan dan sebagai mahasiswa senior di lingkungan kampus. Pada tahun 2001 John ditawarkan untuk bergabung BEM tingkat universitas namun ditolak karena ada persaingan organisasi ekstra kampus yang ingin menempatkan orang di BEM kampus, bagi John hal ini kurang baik untuk sistem demokrasi di tingkat kampus.

John Darmawan lulus pada tahun 2003 pendidikan strata kemudian melanjutkan studi magisternya di Fakultas Hukum, Universitas Airlangga. Pada saat menempuh pendidikan magisternya, dirinya sekaligus bekerja sebagai HRD di salah satu hotel di Bali. Ketika lulus pendidikan magisternya di tahun 2006, John kemudian membentuk rumah produksi yang berfokus dalam pembuatan film, poster, dan baliho untuk iklan pemilu dan pilgub Bali. Sekarang John menjabat sebagai anggota KPU Provinsi Bali.

2. Dewa Kade Raka Sandi (Anggota KPU RI)

I Dewa Kade Raka Sandi merupakan alumni mahasiswa UGM di jurusan Teknik Kimia Angkatan 1990. Ketika masih berstatus mahasiswa sarjana, Raka Sandi cukup aktif dalam kegiatan yang terselenggara di lokus-lokus kampus. Pada mulanya Raka Sandi terlibat kegiatan jurnalistik dengan bergabung Pers Mahasiswa Teknik Kimia UGM (Entropi). Antara tahun 1994 dan 1996 Raka Sandi bergabung dengan GMNI dan dipercaya menjadi ketua cabang. Raka Sandi lulus pada tahun 1999 dan kemudian sempat bekerja di suatu perusahaan industri. Setelah itu Raka Sandi kembali ke Denpasar untuk merintis dan mengajar salah satu Politeknik di Bali. Raka Sandi juga pernah menjabat sebagai ketua Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia (HILLSI). Selanjutnya, Dirinya diterima menjadi anggota KPU Provinsi Bali di periode pertama dan menjadi ketua di periode kedua. Selama menjabat di KPU Provinsi, Raka Sandi melanjutkan kuliahnya di Fakultas Hukum dan kuliah magister di Kajian Budaya, Universitas Udayana. Setelah usai menjabat di KPU Provinsi, Raka Sandi kemudian menjadi anggota BAWASLU Provinsi Bali. Sekarang Raka Sandi ditunjuk menjadi anggota antar waktu KPU RI periode 2017-2022.

Raka Sandi hidup dalam lingkungan keluarga yang aktif dalam politik formal. Ayahnya merupakan seorang tokoh dan aktif dalam pergolakan 1965. Ayahnya sempat menjadi tergabung dalam Resimen Para Komando (RPK) dan ketika masih muda, ayahnya menjabat sebagai ketua PAC PNI. Kakaknya merupakan ketua umum Kongres Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) dan menjadi aktivis pers di Universitas Udayana. Ketika duduk di bangku SMP, selain bersekolah, Raka Sandi belajar bertani dan belajar hidup bermasyarakat.

Sejak berkuliah di UGM, Raka Sandi menyaksikan banyak teman-teman mahasiswanya berpartisipasi dalam lingkaran diskusi, solidaritas sosial, dan kegiatan kemanusiaan lainnya. Raka Sandi juga dipengaruhi oleh seniorinya untuk kenal dengan masyarakat serta belajar sesuatu yang mahasiswa tidak dapatkan ketika di bangku kuliah. Dengan pengalaman ini, Raka Sandi berhasil menempatkan dirinya pada komunitas dan bergaul dengan rekan mahasiswa lain yang berasal dari daerah lain. Raka Sandi kemudian aktif berdiskusi membahas berbagai hal termasuk membahas bagaimana masa depan demokrasi Indonesia ke depan. Selain berdiskusi

ia juga aktif di GMNI Yogyakarta dan memiliki hubungan akrab dengan rekan-rekannya di Kelompok Cipayung.

3. I Nyoman Sukataya (Tim Ahli Gubernur Bali)

I Nyoman Sukataya lahir di Kapal, 8 Oktober 1976 merupakan aktivis mahasiswa dari Fakultas Hukum, Universitas Udayana. Sukataya tumbuh dari latar belakang keluarga yang terlibat dalam politik formal sejak rezim pemerintah Orde Lama. Pasca tragedi 65, penerapan Pancasila sebagai ideologi tunggal, peleburan partai politik, serta tindakan represif terhadap kelompok haluan kiri adalah praktik-praktik yang dilakukan rezim Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya yang kemudian berdampak kepada sebagian besar keluarga kelas pekerja. Pengalaman ini dialami oleh keluarga Sukataya yang saat itu bagian dari PNI. Praktik represif yang dilakukan oleh aparat keamanan atau simpatisan Golkar membuat Sukataya tumbuh sebagai pribadi yang anti-Orba.

“Saya masuk di mana jiwa saya sudah ada nuansa aktivis gerakan rakyat. Saya orang partai memang dan keluarga besar dulu PNI sekarang PDI Perjuangan. Memang dari saya kecil sudah terlatih melawan yang namanya Orde Baru. Keluarga saya sering dipukuli Kostrad. Zaman pemilu 1992 saya sempat ditahan yang waktu itu saya masih SMP. Ini karena latar belakang politik keluarga saya. Saat itu juga didepan rumah kami orang-orang Golkar merusak atribut partai kami.” (Wawancara I Nyoman Sukataya, 8 September 2021 di Kantor Tim Ahli Gubernur Bali).

Sukataya sempat masuk bui karena dituduh merusak bendera Indonesia dan merusak beberapa tempat suci sehingga membuatnya masuk bui di Lapas Kerobokan selama 10 bulan, kemudian dirinya menjalani masa wajib lapor. Setelah melewati masa hukumannya, Sukataya bekerja sebagai buruh di Tanjung Benoa. Di situ Sukataya merasakan pengalaman sebagai buruh dan melihat ketimpangan upah bagi buruh lokal dengan buruh asing. Pada tahun 1996, Sukataya secara resmi menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum, Universitas Udayana dan tergabung dengan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) yang mewakili angkatan Fakultas Hukum 1996.

Tahun kedua di BPM, Sukataya dibujuk untuk bergabung GMNI oleh seniorinya. Sebelumnya dirinya sempat menolak ajakan untuk bergabung dengan alasan dirinya sudah menjadi bagian dari PDI, meskipun pada akhirnya Sukataya memutuskan untuk bergabung. Pada enam bulan pertama Sukataya ditunjuk sebagai ketua komisariat Hukum GMNI, selanjutnya Sukataya menduduki posisi pengurus cabang GMNI di Bali, dan dirinya sempat menjadi wakil-ketua Hubungan Eksternal di GMNI. Di tengah-tengah kariernya sebagai anggota GMNI, Sukataya sempat mendirikan Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) di Universitas Udayana yang tugasnya mendengarkan aspirasi, mengadvokasi, dan mengarahkan masyarakat menjadi kelompok terdidik. Sukataya terlibat dalam gerakan di beberapa demonstrasi di luar Bali seperti di Bandung, Jakarta, dan Malang. Pada tahun 1998 ketika gerakan reformasi bergulir, Sukataya memimpin Pospera Bali dan membangun jaringan keluar daerah.

Ketika lulus dari Fakultas Hukum tahun 2003, Sukataya tergabung dalam beberapa LSM yang bergerak dalam isu-isu lingkungan hidup. Sukataya pernah bergabung Yayasan Manikaya Kauci, dirinya juga pernah menjadi koordinator LSM Walhi Bali dan berpartisipasi dalam gerakan Bali Tolak Reklamasi. Sukataya juga pernah tergabung dalam NGO *Greenpeace* yang mewakili Asia Tenggara. Di bidang hukum, dirinya aktif memberikan advokasi di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI). Dalam karier profesionalnya, Sukataya pernah menjabat sebagai Direktur Agrowisata dan pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Badung. Selama menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Badung, dirinya dianggap tidak netral dan melanggar kode etik sebanyak dua kali. Pertama karena dirinya sering menghadiri kunjungan kerja Presiden dan mengkritik calon gubernur Bali, Ida Bagus Rai Mantra dari partai Golkar di pilkada gubernur Provinsi Bali tahun 2018. Sekarang dirinya menjadi bagian dari Tim Ahli Bidang Hukum Gubernur Bali.

4. I Nyoman Mardika (Mantan Anggota KPI Provinsi Bali)

I Nyoman Mardika atau yang sering disapa Mardika lahir di Denpasar, 4 Maret 1971 yang sering terlibat dalam gerakan di Bali. Pada tahun 1990 dirinya masuk jurusan Sastra Inggris di Universitas Warmadewa. Selama berkuliah dirinya berperan dalam organisasi kampus. Mardika pernah menjabat sebagai ketua senat Mahasiswa

Fakultas Sastra Warmadewa, selanjutnya Mardika pernah menjabat sebagai ketua senat Perguruan Tinggi (Sekarang BEM) Warmadewa. Mardika juga aktif dalam organisasi dalam organisasi ekstra kampus. Dirinya pernah menjabat sebagai sekretaris Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) Indonesia, selain itu dirinya bergabung dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Mardika merupakan pendiri *Sabha Yowana* yang merupakan forum komunikasi pemuda antar banjar (pembagian wilayah administratif setingkat Rukun Warga) yang berupaya melestarikan seni, budaya, dan tradisi Bali.

Keterlibatan Mardika dalam gerakan diawali dengan permasalahan internal kampus. Kemudian, pada tahun 1993 Mardika bersama teman-temannya bergerak terhadap isu Bali Nirwana Resort (BNR) yang menolak pembangunan resort oleh kelompok usaha di bawah kepemimpinan Bakrie di kawasan suci Bali. Pada saat itu, Mardika beserta rekan-rekannya mendapatkan praktik represif dari birokrasi sipil maupun dari TNI/POLRI. Ketika lulus di tahun 1996, Mardika pernah terlibat pada Peristiwa 27 Juli (Kudatuli) yang merupakan konflik internal PDI untuk menentukan ketua umum partai antara Megawati Soekarnoputri dan Soerjadi.

Selama 20 tahun Mardika tumbuh di Yayasan Manikaya Kauci dan aktif dalam gerakan advokasi. Di yayasan tersebut, Mardika lebih aktif dalam isu-isu lokal di Bali. Contoh isu yang dirinya hadapi adalah konflik agraria Sumberklompok di Bali Utara dirinya membantu masyarakat untuk bernegosiasi dengan negara perihal perebutan lahan antara rakyat dan negara. Kasus lain adalah reklamasi Teluk Benoa Mardika aktif terlibat dalam gerakan protes dan memberikan edukasi kepada masyarakat Bali tentang isu reklamasi tersebut. Selanjutnya, Mardika bergabung dengan KPU selama enam tahun dan sekarang dirinya menjabat sebagai kelian atau kepala dusun Batu Bintang, Desa Dauh Puri Klod, Denpasar dan direktur Yayasan Bintang Gana.

5. I Gede Pasek Suardika (Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara)

Gede Pasek Suardika merupakan politisi senior asal Bali yang lahir di Singaraja, 21 Juli 1969. Selama aktif menjadi mahasiswa dirinya kerap kali aktif dalam kegiatan mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya. Pasek mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di bidang bela diri dan olahraga. Dirinya juga terlibat dalam kegiatan keumatan dengan terlibat di organisasi Unit Aktivitas Kerohanian Hindu

Dharma (Unikahidha) Universitas Brawijaya. Pasek juga terlibat dalam perintisan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI). Pasca lulus dari Fakultas Hukum dirinya aktif dalam dunia jurnalistik dengan menjadi wartawan di Harian Nusa dan Tabloid Bali Aga. Ketika menjadi wartawan, Pasek juga sekaligus terlibat aktif dalam gerakan-gerakan dalam skala lokal hingga gerakan reformasi yang sifatnya nasional.

Setelah berkarier sebagai wartawan, Pasek kemudian merintis kariernya sebagai advokat. Selama berkarier di dunia hukum, dirinya sering memberikan pembelaan hukum terhadap masyarakat kecil. Karier Pasek yang gemilang membuatnya dilirik oleh beberapa politisi lokal untuk menjadi konsultan politik dalam tim pemenangan mereka. Pada tahun 2004 Pasek sempat maju dalam pemilihan DPD RI namun dirinya tidak lolos.

“Karena saya suka tantangan. Waktu itu Demokrat masih partai baru. Saya waktu itu maju DPD RI tahun 2004, saya masuk sepuluh besar dari empat puluh delapan calon. Lalu saya berpikir waktu zaman Ibu Mega dikejar-kejar oleh Orde Baru kita sering membuntuti Bu Mega. Kita suka membela mana yang lebih lemah maka kita ada di situ. Kemudian ketika PDIP sudah sangat kuat di Bali muncul Partai Demokrat sebagai sesuatu yang baru, ada harapan baru, agak berat di Bali itulah membuat kita ingin bela hal tersebut agar bisa berkembang. Jadi saya masuk Demokrat untuk mendukung SBY” (Wawancara dengan Gede Pasek Suardika, 15 November 2021 melalui WhatsApp).

Pasek kemudian terpilih menjadi wakil-ketua Tim Kampanye Provinsi SBY-JK dan ketua Tim Advokasi untuk SBY di Bali, setelah itu dirinya masuk ke dalam Partai Demokrat. Alasan dirinya memilih Partai Demokrat karena menyukai tantangan dan mencoba membangun partai baru di tengah hegemoni PDI-P yang sangat berkuasa di Bali. Dengan menggunakan Partai Demokrat sebagai kendaraan politiknya pada pemilu tahun 2009, dirinya sukses menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014. Usai menjabat sebagai DPR RI, dirinya terpilih menjadi anggota DPD RI periode 2014-2019 dapil Bali. Sekarang dirinya menjabat sebagai ketua umum Partai Kebangkitan Nusantara.

Sikap Pragmatis Mantan Aktivist di Bali

Mantan aktivis pro-demokrasi di Bali terbagi menjadi empat bagian. Golongan pertama adalah mereka yang tergabung dalam gerakan reformasi 1998 dan pasca transisi pemerintah mereka mengikuti sepenuhnya mengikuti logika para patron mereka. Mereka adalah aktivis pada masa Orde Baru mengalami tindakan represif karena menjadi bagian dari partai oposisi dan setelah reformasi, giliran mereka yang menduduki kekuasaan yang signifikan dalam kondisi politik di Indonesia. Menjadi bagian dari partai penguasa dan terlibat aktif pada saat reformasi memberikan akses kekuasaan atau jabatan penting baik di tingkat pusat atau daerah. Contoh mantan aktivis dari golongan pertama adalah I Nyoman Sukataya. Dirinya sangat dekat dengan PDI-Perjuangan. Ketika menjabat sebagai anggota KPU Badung, Sukataya sering mendapat evaluasi dari KPU karena sering menghadiri kunjungan Joko Widodo yang merupakan bagian dari PDI-Perjuangan. Pasca keluar dari KPU dirinya diangkat menjadi Tim Ahli Gubernur pasangan Koster-Ace yang menggunakan PDI-Perjuangan sebagai kendaraan politiknya.

Golongan kedua adalah mereka yang sudah bernegosiasi dengan patron, namun tetap aktif dalam gerakan. Mereka tidak berniat untuk terjun dalam politik formal, akan tetapi motif mereka untuk menjadi pejabat negara hanya untuk mendapatkan pemasukan untuk kehidupan dirinya dan keluarganya. I Nyoman Mardika misalnya, ketika menjabat sebagai anggota KPI Provinsi Bali dirinya *lobbying* dengan kelompok partai yang berkuasa di DPRD Bali. Meskipun sudah bernegosiasi namun dirinya sering terlibat dalam gerakan selama menjabat sebagai pejabat negara.

“Praktik *lobbying* sudah menjadi rahasia umum. Termasuk pemilihan KPU RI hingga KPK harus lewat *lobby-lobby* seperti itu. Terlepas nanti ketika menjadi komisioner independensi dan integritas itu urusan belakangan, yang penting masuk dulu. Konsekuensinya apabila kita kaku terhadap aturan maka periode selanjutnya kita tidak dipilih. Karena tidak bisa diajak negosiasi. Bahkan saya sebenarnya orang yang melanggar dari pakem lembaga negara. Saya masuk KPI tapi masih ikut demo-demo dengan gerakan aktivis dan itu terjadi selama

6 tahun selama saya masih menjadi pejabat negara.” (Wawancara dengan I Nyoman Mardika, 17 April 2021 di Denpasar).

Golongan ketiga adalah aktivis pro-demokrasi yang dahulunya aktif terlibat dalam gerakan dan merupakan bagian dari masyarakat sipil kemudian masuk ke dalam lembaga pemerintahan untuk membangun karier mereka disana. Mereka memiliki jaringan yang kuat dengan aktivis lain berupa informasi tentang kesempatan untuk masuk di sebuah lembaga negara dan kemudian berusaha untuk ikut bergabung ke dalamnya. Mantan aktivis yang masuk dalam kategori ini secara sadar ingin membangun ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan pribadi mereka dan memanfaatkan apa yang mereka bangun ketika sebelumnya terlibat aktif sebagai aktivis.

“Orang-orang pasti akan memenuhi kebutuhan mendasar, kemudian rasa aman, kasih sayang, dan penghargaan aktualisasi diri. Sikap perilaku seseorang tidak hanya dari rasionalitasnya saja tetapi juga sebagai manusia dia dipengaruhi oleh kondisi sosialnya.” (Wawancara Raka Sandi, 10 September 2021 melalui *Zoom Meeting*).

Idealisme aktivis yang termasuk dalam kategori ini tidak sepenuhnya hilang ketika mereka sudah masuk dalam lembaga pemerintahan. Posisi mereka cenderung netral karena jabatan mereka sebagai pejabat negara sehingga kurang mampu memberikan perubahan yang besar terhadap sistem yang sudah ada. Mereka berpendapat bahwa idealisme mereka masih ada namun dengan semangat yang berbeda. Jika dahulu ketika menjadi mahasiswa mereka merubah sistem dari luar, sekarang mereka mencoba untuk mereformasi lembaga dari dalam dan pada waktu yang sama mereka mendapatkan manfaat ketika mereka menjadi bagian dari lembaga itu.

“Sebenarnya tidak terlalu banyak berbeda jika kita punya idealisme di dalam. Bedanya adalah aktivis itu punya nilai lebih untuk berada di dalam sistem. Dari pada kita teriak di jalan, itulah konsep awal reformasi, apabila mantan aktivis dibiarkan tidak diberi kedudukan dan jabatan dia akan turun kejalan dan akan mengganggu jalannya pemerintahan. Kita bikinkan dia lembaga untuk

memasukan mereka di situ. Yang dimaksudkan untuk tidak berbicara liar tetapi adalah argumentasi dan idealismemu dengan berada di suatu lembaga itu. Maka ada seleksi alam ketika orang berada di lembaga itu. Apabila idealismenya hanya koar-koar di jalan dan ketika dia masuk di lembaga dia menjadi lemah.” (Wawancara John Darmawan, tanggal 10 Maret 2021 di Kantor KPU Provinsi Bali).

Golongan aktivis keempat adalah kelompok aktivis yang memanfaatkan jaringan dengan aktivis-aktivis lain yang dibangun pada masa pergerakan. Kelompok ini sedikit mirip dengan golongan ketiga, namun mereka memutuskan untuk terjun dalam politik praktis yang bertujuan untuk masuk dalam panggung kekuasaan yang lebih besar dan posisi mereka sangat signifikan dalam pembuatan kebijakan negara. Gede Pasek Suardika merupakan mantan aktivis yang masuk bagian dari golongan ini. Pasek mengakui bahwa jaringan aktivis reformasi adalah salah satu faktor penting yang mengantarkan dirinya lolos ke kursi DPR 2009.

“Pertama kita menjadi aktivis, otomatis banyak jaringan dan banyak teman. Jadi pertemananlah yang mengantarkan kita sampai di DPR. Kemudian saya terjun sebagai wartawan, selama menjadi wartawan kita berkomunikasi dengan banyak tokoh.” (Wawancara dengan Gede Pasek Suardika, 15 November 2021 melalui WhatsApp).

Idealisme aktivis pada golongan ini yang cenderung berubah. Ketika mantan aktivis sukses menjadi bagian dari kekuasaan, maka mereka harus menyesuaikan idealisme mereka dengan pola pikir kekuasaan. Paradigma mantan aktivis sepenuhnya berubah dibandingkan pada saat mereka tergabung dalam kelompok pergerakan. Sulit bagi mereka untuk memperjuangkan idealisme mereka karena terdapat banyak tekanan yang mereka hadapi dan di sisi lain mereka juga harus mempertahankan eksistensi mereka dalam panggung kekuasaan.

Mantan aktivis di Bali telah mengalami dinamika dan tren politik yang berbeda. Terdapat aktivis yang sepenuhnya terkooptasi dengan rezim, di sisi lain terdapat mantan aktivis yang menjadi oposisi fundamental karena masih memiliki akar idealisme dan hubungan yang kuat dengan LSM yang membesarkannya. Beberapa

mantan aktivis memilih untuk menghindari jebakan dilematis antara kooptasi rezim dan oposisi fundamental dengan bersikap netral. Hal ini disebabkan oleh dua kondisi pertama, jabatan yang menuntut mantan aktivis untuk bersikap netral. Kedua, bagi mereka yang masuk dalam politik formal, mereka sepenuhnya memiliki pertimbangan strategis dengan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh sistem demokrasi.

Analisis Hasil Temuan

Analisis berdasarkan data lapangan dengan teori *rational choice* menunjukkan terdapat indikasi perubahan orientasi politik (idealisme ke pragmatisme) karena para mantan aktivis memiliki tujuan lain yang sifatnya personal. Kasus I Gede Pasek Suardika menunjukkan bahwa perjalanan karier politiknya tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan dari manfaat yang diperoleh dari tindakan tertentu, minim kemungkinan dirinya turun ikut dalam gerakan kolektif jika tidak menguntungkan dirinya. Selanjutnya, kasus I Gede John Darmawan dan I Dewa Kade Raka Sandi menunjukkan hasil yang signifikan dengan teori Geddes. Pasca reformasi, mereka memanfaatkan jaringan aktivis untuk membantu mengembangkan karier mereka. Kasus I Nyoman Sukataya menunjukkan corak yang sedikit berbeda namun tetap memiliki korelasi dengan teori Geddes. Meskipun dirinya (I Nyoman Sukataya) berperan sebagai pejabat negara ketika menjadi anggota KPU Kabupaten Badung yang semestinya bersikap netral, dirinya tidak khawatir untuk menjalin hubungan dengan PDI-P. Tidak lama setelah dirinya mundur sebagai anggota KPU, I Nyoman Sukataya ditunjuk sebagai Tim Ahli Gubernur Bali.

Tabel 1. Kategorisasi Mantan Aktivist Bali Pasca Reformasi

No.	Mantan Aktivist	Institusi		Bentuk Pragmatisme		
		Partai Politik	Non-Partai	Partisanship	Karier	Transaksional
1.	I Gede John Darmawan	△	●	△	●	△
2.	I Dewa Kade Raka Sandi	△	●	△	●	△

3.	I Nyoman Sukataya	●	●	●	○	○
4.	I Nyoman Mardika	△	●	△	○	●
5.	I Gede Pasek Suardika	●	○	●	○	○
Keterangan: ● = Kuat ○ = Moderat △ = Lemah						

Sumber: Diolah dari data primer

Di sisi lain, teori *rational choice* menyatakan bahwa pragmatisme mantan aktivis didasarkan keinginan untuk memaksimalkan karier dan kepentingan pribadi tidak dapat sepenuhnya menjelaskan perubahan orientasi politik mantan aktivis pro-demokrasi di Bali. Keterbatasan tersebut terletak pada aktivis yang masih bersikap idealis meskipun perannya sebagai pejabat negara. I Nyoman Mardika menyatakan bahwa dirinya melakukan negosiasi dengan partai penguasa di level DPRD Provinsi Bali, akan tetapi I Nyoman Mardika tetap tergabung dalam gerakan-gerakan kolektif di Bali. Dirinya tetap terlibat dalam isu atau persoalan ditingkat lokal dan berperan penting dalam gerakan di Bali. Oleh karena itu, sikap pragmatis I Nyoman Mardika terletak pada posisinya sebagai pejabat negara dan di waktu yang sama tetap mempertahankan idealismenya.

Berdasarkan analisis hasil temuan di atas, penulis berargumen bahwa perubahan orientasi politik muncul berdasarkan kalkulasi rasional yang dilakukan mantan aktivis dengan mempertimbangkan faktor karier dan kebutuhan. Lebih lanjut, motif karier lebih menonjol dibanding motif transaksional dan *partisanship*, maka mantan aktivis pro-demokrasi cenderung mengisi posisi di institusi non partai politik. Sebaliknya jika motif partisan yang dominan pada seorang mantan aktivis, maka mereka cenderung mengisi posisi di partai politik.

KESIMPULAN

Perubahan idealisme mantan aktivis di Bali tidak terlepas dari pengalaman mantan aktivis dalam melihat suatu realitas. Pekerjaan yang aman dan kesempatan untuk berkarier sebagai pejabat memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan mantan aktivis pro-demokrasi. Penelitian ini menjelaskan posisi *rational choice* Geddes (1994) dengan studi kasusnya di negara-negara demokrasi berkembang di

Amerika Selatan dan sedikit-banyak mampu memberikan relevansi analitis pada para mantan aktivis yang menjadi studi kasus dalam artikel ini.

Terdapat tiga analisis atas temuan penelitian, pertama, perubahan orientasi politik mantan aktivis dapat dilacak sejak aktivis bergabung dalam gerakan ketika berstatus mahasiswa hingga perjalanan karier mereka pasca mereka lulus dari kampus. Momentum reformasi membawa arah demokrasi ke arah yang lebih baik, sehingga kesempatan terbuka lebar bagi mereka yang ingin masuk dalam kontestasi politik tidak hanya dalam politik praktis, namun pembagian kekuasaan terdistribusi semakin luas (patron-klien).

Kedua, perubahan orientasi mantan aktivis didorong oleh faktor kebutuhan dan pengembangan karier. I Nyoman Mardika, menjadi anggota KPI karena ingin mendapatkan gaji/honor tetap. I Gede John Darmawan dan I Dewa Kade Raka Sandi berfokus mengembangkan karier mereka dengan menjabat sebagai anggota KPU. Mereka memanfaatkan jaringan aktivis untuk mendapatkan saluran sumber daya. I Gede Pasek Suardika sebagai politisi tingkat nasional tidak hanya mendapatkan pendapatan dan prestise yang tinggi, tetapi juga potensi untuk membangun jaringan klien dan tanggungan politiknya sendiri. I Nyoman Sukataya sebagai aktivis partai, tentu mendapat keuntungan dengan menjabat sebagai pejabat negara lewat distribusi kekuasaan dari anggota partai yang sama.

Ketiga, perubahan orientasi politik mantan aktivis kembali menegaskan bahwa praktik pragmatisme masih terawat hingga kini. Pragmatisme mantan aktivis pro-demokrasi menunjukkan sikap yang berlawanan ketika mereka masih berstatus sebagai aktivis dalam gerakan reformasi. Sehubungan dengan posisi yang bertentangan dan peran yang terbatas dari mantan aktivis, mereka kemudian menciptakan orientasi politik yakni “pemberlakuan pragmatis” melalui perpaduan antara idealisme dan oportunisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, A. R. (2015). Problematika Anak Muda Di Panggung Kekuasaan. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* iii–v. <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.4691>.
- Aspinall, E. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in*

- Indonesia. Stanford University Press.
- Aspinall, E. (2012). Indonesia: Moral Force Politics and the Struggle against Authoritarianism. *Student Activism in Asia: Between Protest and Powerlessness* 153180. <https://doi.org/10.5749/minnesota/9780816679683.003.0007>.
- Bünthe, M., & Ufen, A. (2009). *Democratization in Post-Suharto Indonesia*. Routledge London.
- Crain, W. M., & Tollison, R. D.. (1990). *Predicting Politics: Essays in Empirical Public Choice*. University of Michigan Press.
- Creswell, J. W., & Creswell J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications.
- Dibley, T., & Ford, M. (2019). *Activists in Transition: Progressive Politics in Democratic Indonesia*. Cornell University Press.
- Ekowati, E. Y. (2019). Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada. *Jurnal Transformative* 5(1):16–37. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2019.005.01.2>.
- Geddes, B. (1994). *Politician's Dilemma*. University of California Press.
- Giugni, M., McAdam, D., & Tilly, C. (Eds.). (1999). *How Social Movements Matter* (NED-New edition, Vol. 10). University of Minnesota Press. <http://www.jstor.org/stable/10.5749/j.cttt706>.
- Hadiz, V. R. (2005). *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*. Jakarta: LP3ES.
- Hadiz, V., & Robison, R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. Routledge.
- Lee, D. (2016). *Activist Archives: Youth Culture and the Political Past in Indonesia*. Duke University Press.
- Linz, J. J., and Stepan, A. (1996). *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. jhu Press.
- Mietzner, M. (2012). Ideology, Money and Dynastic Leadership: The Indonesian Democratic Party of Struggle, 1998–2012. *South East Asia Research* 20(4):511–31. <https://doi.org/10.5367/sear.2012.0123>.
- Mietzner, M. (2013). *Fighting the Hellhounds: Pro-Democracy Activists and Party*

- Politics in Post-Suharto Indonesia. *Journal of Contemporary Asia* 43(1):28–50.
<https://doi.org/10.1080/00472336.2012.735919>.
- Mudhoffir, A. M, & Alamsyah, A. R. (2018, April 6). Buasnya Sistem Politik Indonesia Halangi Upaya Reformasi Dari Dalam Oleh Mantan Aktivist. *The Conversation*.
<https://theconversation.com/buasnya-sistem-politik-indonesia-halangi-upaya-reformasi-dari-dalam-oleh-mantan-aktivis-94523>.
- Sastramidjaja, Y. (2019). Student Movements and Indonesia’s Democratic Transition. *Activists in Transition: Progressive Politics in Democratic Indonesia* 23–40.
<https://doi.org/10.1515/9781501742491-004>.
- Stokke, K, & Hiariej, E. (2017). Politics of Citizenship in Indonesia. *Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, in Collaboration with Polgov Fisipol UGM and the University of Oslo*. https://doi.org/10.1007/978-981-16-7955-1_1.
- Suryawan, I. N. (2010). *Genealogi Kekerasan Dan Pergolakan Subaltern: Bara Di Bali Utara*. Kencana.
- Törnquist, O. (2006). Assessing Democracy from below: A Framework and Indonesian Pilot Study. *Democratization* 13(02):227–55.
<https://doi.org/10.1080/13510340500523937>.
- Whitehead, L. (1989). The Consolidation of Fragile Democracies: A Discussion With Illustrations. In *Democracy in the Americas: Stopping the Pendulum*, Edited by Robert Pastor, 79–95.
- Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik* 16(1):69–81. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>.